



1. Opini yang dikirim ke: fajar@fajar.com, baik melalui email atau via WhatsApp ke nomor telepon pers yang tertera di halaman ini. 2. Setiap opini yang dikirim wajib menyertakan foto pribadi (bukan foto orang lain) dan nomor telepon pers yang tertera di halaman ini. 3. Opini akan kami edit apabila terdapat kesalahan gramatikal dan/atau substansi.

INTERAKTIF: Kami menerima dan memuatkan yang dikirimkan kepada kami melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kami akan memuatkan nama dan alamat/ nomor telepon pengirim.

### Indonesia Kendalikan Dunia

Indonesia memegang peranan penting dalam menjadi pemain ekonomi global. Itu terbukti dari limas, arangan ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah. Ada dua komoditas penting di antaranya berasal dari Indonesia. Yakni nikel dan batu bara. Khusus nikel misalnya, sejak adanya larangan ekspor bahan mentah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah negara berinteraksi dengan Indonesia untuk membeli nikel di dalam negeri. Oleh karena itu, nikel Indonesia, Uni Eropa bahkan menggugat Indonesia ke organisasi perdagangan dunia atau WTO. Namun pemerintah tak gentar. Saat ini menghadapi gugatan tersebut, jika nikel Indonesia dilandani dengan baik, peluang menjadi raksasa ekonomi dunia semakin terbuka lebar. Apalagi cadangan nikel kira-kira mencapai 2,8 miliar ton.

Jika bahan baku ini terserap, industri akan kesulitan memproduksi. Apalagi saat ini berkembang kendaraan listrik. Bahan baku baterai daya dan nikel. Sektor merupakan komponen terminal dalam kendaraan listrik. Perkembangan kendaraan listrik didukung percepatan transisi energi ke ramah lingkungan. Indonesia tentu memiliki keunggulan strategis dalam pengelolaan nikel di dalam negeri. Oleh karena itu, jika dunia butuh nikel, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai produsen nikel di Indonesia. Cukup sendiri, memanfaatkan untuk industri namun jangan Jawa keluar secara gelondongan atau nikel dalam bentuk bahan mentah. Namun pemerintah juga jangan mengabaikan daerah penghasil nikel. Keuntungan harus dibagikan juga oleh daerah. Sebab wilayahnya yang dieksploitasi dan tidak meningkatkan. Seharusnya dana bagi hasil dan eksplotasi tambang juga harus dirasakan ke daerah. Termasuk membayai infrastrukturnya (\*)



### BERANDA Adhij Amin Usat

### Flexing

Tak ada larangan jadi kaya di Indonesia. Tak ada juga larangan untuk memilikinya apa saja yang mampu dimiliki oleh seseorang. Termasuk untuk membeli barang mewah, bermerek, hingga tentu saja sebuah mobil mewah premium. Di Jakarta hari Minggu kemarin — di jalan Tol Depok Anzasan Jakarta Selatan — polisi dibentarkan mengur serombongan konvoi mobil mewah. Mereka secara bersema-ma berhelmet, melakukan pengaturan serta pemantauan untuk aktivitas dengan mobil mewah mereka. Polisi menegur karena rombongan ini membuat kemacetan dan mengganggu lalu lintas melangka-langkannya yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, disamping kendaraan di bagian lain. Di jalan tol. Hal itu terbagi pada Pasal 41. Pembentahan dapat dilakukan bagi hal yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Namun tidak digunakan untuk menindak atau mendongkrak kendaraan.

ly screams, but wealth whispers: Artinya justru orang kaya sesungguhnya sebenarnya tidak suka pameran. Fenomena flexing bukan berarti mereka yang diuji pameran sebenarnya bukan orang kaya yang sesungguhnya. Jadi kalau orang yang kaya itu tidak bersik, whispers. Jadi agak malu berbicara tentang kekayaan. Jadi kalau orang yang kaya itu malu berbicara, atau memamerkan yang berarti dia belum kaya dalam arti yang sesungguhnya. Padahal menurut Kasali, banyak sekali fenomena orang kaya yang penampilannya terlihat sederhana dan bahkan amat sederhana. Mereka bahkan dukuk di kelas ekonomi dalam transportasi umum. Tidak menggunakan pesawat pribadi. Kasali menceritakan pengalaman pribadinya. Dia pernah naik pesawat dan dukuk di kelas ekonomi, ternyata yang dukuk di sebelahnya bukan orang sembarangan. Seperti dia adalah pembantu-hati jika dukuk di kelas ekonomi karena jangannya salah satu orang terkaya dunia sedang dukuk di sampingnya.

Fenomena di jalan Tol Depok Anzasan kemarin adalah salah satu contoh — dan sudah menjadi sesuatu yang hampir terjadi di mana-mana. Rencan Kasali — seorang pakar bisnis Indonesia — menjelaskan ada satu fenomena ketika orang-orang suka pameran hartaunya, berpakaian merek mahal, liburan ke luar negeri, hingga makan di tempat-tempat mewah — menjelaskan ada satu fenomena ketika orang-orang suka pameran hartaunya, berpakaian merek mahal, liburan ke luar negeri, hingga makan di tempat-tempat mewah. Namun tidak digunakan untuk menindak atau mendongkrak kendaraan.

Beberapa dekade lalu para pemimpin mengorganisir dilakukan hidup sederhana di gemanya. Di awal pemerintahan Jokowi — pernah ada pembentahan ketika menggunakan fasilitas transportasi premium. Pesta-pesta hajatan perkawinan dibatasi jumlah undangannya. Namun malik malik menampar dikalahkan. Kegiatan kembali berjalan seperti biasa. Melakukan kemegahan seperti yang menjadi hak orang yang berpunya. Meskipun memang menjadi penting mungkin hasil dan sebuah proses yang tak jadi flexing dan bangga, bisa jadi bagian dari sebuah ketidakefektifan. \*\*\*

## Paradigma Makassar (belum) Sehat



M. HATTAT Alumni Kesenikan Masyarakat University of Illinois at Chicago, AS

Sebagai salah satu simpul utama arus perdagangan dan jasa di Indonesia Timur, Kota Makassar telah berkembang menjadi kota megapolitan yang menjadi magnet urbanisasi penduduk dari daerah lain. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut memunculkan pelbagai problem layanan publik, salah satunya adalah masalah kesehatan masyarakat.

Sayangnya, seperti yang lazim nampak di kota-kota besar lainnya di Indonesia, masalah kesehatan belum mendapatkan perhatian yang baik dan pemerintah setempat. Para pemegang kebijakan masih terkukung oleh dogma paradigma sakit-quota, alih-alih paradigma sehat, yaitu memprioritaskan penganggaran untuk orang-pakar kesehatan menjaga masyarakat Makassar agar tetap sehat. Hal ini nampak jelas pada kebijakan Walikota Danny Pomantyo yang berkecenderungan untuk status sebagai Puskesmas menjadi RSUD, seperti pada kasus RSUD Bata. Rencana memperbanyak Rumah Sakit (RS) untuk melayani masyarakat Makassar yang heterogen merupakan perubahan maha, namun kurang tepat jika dikayak sisi kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut diperburuk pandemi Covid-19 yang belum reda hingga saat ini.

menghilang dengan sendirinya karena RS tidak memiliki fungsi tersebut. Singkatnya, ia berubah menjadi layanan kesehatan masyarakat yang bersifat pasif, tak lagi aktif seperti ketika masih berstatus Puskesmas. Hal inilah yang mestinya dikaji secara komprehensif sebelum memutuskan perubahan status Puskesmas menjadi RS.

Paradigma Sakit Data Kementerian Kesehatan menyebutkan negara kita masih menghadapi ancaman meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit jantung koroner, diabetes dan stroke. Sebagian besar anggaran BPJS (sekitar 80%) terserap kasus-kasus rawat inap PTM yang disebabkan perubahan perilaku pencaharian, perubahan epidemiologi dan gaya hidup masyarakat kita. Lanjut beliau, penyakit-penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui tindakan promotif dan preventif seperti penyuluhan gizi seimbang, menggerakkan aktivitas fisik, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Disamping peran pokok Puskesmas yang tak bisa tergantikan oleh RS. Fungsi layanan kesehatan yang berfokus pada masyarakat banyak dan berperan besar dalam mencegah mereka jatuh menjadi penderita PTM di atas. Hal ini juga terbukti di era pandemi Covid-19, ketika Puskesmas

menjadi ujung tombak penyuluhan 3M, vaksinasi massal, peacakan kasus serta surveilans. Sayangnya, realita seperti ini luput dari perhatian para pemegang kebijakan di Makassar.

Kemungkinan "paradigma sakit" dapat dimaklumi karena hingga saat ini Pemerintah Kota Makassar belum membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPDK) seperti beberapa daerah di Jawa, Sumatera dan NTT. Lembaga yang di dirikan Kepres Nomor 12 Tahun 1994 tersebut berbentuk lembaga independen yang beranggotakan tokoh masyarakat serta profesional terkait kesehatan dan secara reguler memberikan masukan serta opini kepada kepala daerah. Ia juga melakukan advokasi terkait anggaran kesehatan dan bersama pemerintah daerah menyusun strategi pencaharian dan prioritas kegiatan pembangunan. Perlu digarisbawahi bahwa badan tersebut hanya bertindak di atas kebijakan dan bukan teknis operasional agar tidak tumpang tindih dengan instansi yang mengurus hal kesehatan.

Memang sulit mengubah paradigma sakit yang telah diadopsi oleh sebagian besar pembesar kita, walau bukan tak mungkin. Tindakan promotif-preventif tak langsung dirasakan manfaatnya. Tak seperti tindakan kuratif. Namun ibarat menanam pohon bambu yang baru tampak tumbuh setelah 3-4 tahun, dampaknya teramat luar biasa bagi pembangunan kesehatan di kota kita tercinta ini. Menuju mpan bersama Kota Dunia yang sehat, cerdas dan produktif. (\*)

**Salam Digital**

Hanan FAJAR lebih 40 tahun dan kini telah hadir dengan koran digital, untuk pelanggan setia kami akan memberikan layanan gratis e-paper 2x halaman. Cukup mengisi data berikut ini secara lengkap.

Nama Pelanggan : .....  
 Alamat Lengkap : .....  
 Email : .....  
 No HP/WA : .....

Kisiah ke : 0111442222      085255453641 (whats)  
 081354866680 (viki)      081182126870 (waan)  
 081242711212 (nalka)

Jalan-jalan Kurus      ar Otak      aji PPPK

**FAJAR** (Penerbit: PT Fajar Pajari)

**Manajemen Umum & Operasional:**  
 Direktur Utama: H. Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Direktur Utama: H. Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala Redaksi: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala Produksi: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala Keuangan: Agus Salim Adhij Usat  
 Sekretaris Redaksi: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Periklanan & Hubungan Masyarakat:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Produksi & Logistik:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Hukum & Administrasi:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen IT & Sistem:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Pemasaran & Promosi:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen SDM & Pelatihan:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Fasilitas & Keamanan:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Hubungan Masyarakat & Publikasi:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Riset & Pengembangan:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Kualitas & Mutu:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Lingkungan & Sosial:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Inovasi & Teknologi:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat

**Manajemen Keberlanjutan & ESG:**  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Kepala: Agus Salim Adhij Usat  
 Wakil Kepala: Agus Salim Adhij Usat



**BERANDA**  
Aidir Amin Daud

## Flexing

Tak ada larangan jadi kaya di Indonesia. Tak ada juga larangan untuk memiliki apa saja yang mampu dibeli oleh seseorang. Termasuk untuk membeli barang mewah, bermerek, hingga tentu saja sebuah mobil mewah premium. Di Jakarta hari Minggu kemarin — di jalan tol Depok-Antasari Jakarta Selatan — polisi diberitakan menegur serombongan konvoi mobil mewah. Mereka secara bersamaan berhenti, melakukan pengaturan serta pemotretan untuk aktivitas dengan mobil mewah mereka. Polisi menegur karena rombongan ini membuat kemacetan dan sesungguhnya telah melanggar ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, disebutkan kendaraan dilarang berhenti di jalan tol. Hal itu tertuang pada Pasal 41. Pemberhentian dapat dilakukan di bahu jalan, namun itu pun ditegaskan diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat. Namun tidak digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan.

\*\*\*\*

Fenomena di jalan tol Depok-Antasari kemarin adalah salah satu contoh — dan sudah menjadi sesuatu yang hampir terjadi di mana-mana. Rhenald Kasali — seorang pakar bisnis Indonesia — menyatakan ada satu fenomena ketika orang-orang suka pamer hartanya, berpakaian merek mahal, liburan ke luar negeri, hingga makan di tempat-tempat mewah. Kasali meyebutnya dengan istilah flexing. Flexing merupakan fenomena yang biasa terjadi di kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini ketika orang doyan memamerkan kekayaannya.

Founder Yayasan Rumah Perubahan ini dalam sebuah tayangan YouTube-nya menjelaskan ada satu pepatah yang menyebutkan 'pover-

ty screams, but wealth whispers'. Artinya justru orang kaya sesungguhnya sebenarnya tidak suka pamer. Fenomena flexing bisa diartikan mereka yang doyan pamer sebenarnya bukan orang kaya yang sesungguhnya.

Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik, whispers. Jadi agak malu membiarkan tentang kekayaan. Jadi kalau orang masih melihat label harga, atau mempersoalkan uang berarti dia belum kaya dalam arti yang sesungguhnya. Padahal menurut Kasali, banyak sekali fenomena orang kaya yang penampilannya terlalu sederhana dan bahkan amat sederhana. Mereka bahkan duduk di kelas ekonomi dalam transportasi umum. Tidak menggunakan pesawat pribadi. Kasali menceritakan pengalaman pribadinya. Dia pernah naik pesawat dan duduk di kelas ekonomi, ternyata yang duduk di sebelahnya bukan orang sembarangan. Sejak itu dia selalu berhati-hati jika duduk di kelas ekonomi karena jangan-jangan salah satu 'orang terkaya dunia' sedang duduk di sampingnya.

\*\*\*\*

Beberapa dekade dulu para pemimpin menganjurkan dilakukannya 'hidup sederhana' di semua lini. Di awal pemerintahan Jokowi - pernah ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas transportasi premium. Pesta dan hajatan perkawinan dibatasi jumlah undangannya. Jamuan makan minum rapat di kantor pemerintahan dibatasi. Namun semuanya tak berlangsung normal. Kegiatan kembali berjalan seperti biasa. Melakukan kemewahan seperti menjadi hak orang yang mempunya. Meskipun memang, menjadi mempunya mungkin hasil dari sebuah proses yang tak adil. Flexing dan lainnya, bisa jadi bagian dari sebuah ketidakadilan. \*\*\*